

MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI PONDOK PESANTREN

Suwito NS

Abstract

The emergence of economic business in pesantrens was driven by their necessity to survive. For that reason, pesantrens needed to run economic activities. The activities were determined by: (a) the ability of kyai to read, define, utilize, and organize their resources, (b) geographical condition, and (3) social and cultural condition, both inside and outside the institutions.

The types of economic business can be classified into four major groups, namely: agribusiness (farming, fishery, planting), services (KBIH, offset, LAZIS, BMT, cooperation), trade (retail business, shops, distribution), and industry (water purification, furniture). Almost all pesantrens in this research ran agribusiness, especially on-farm project. There were only three pesantrens that ran service business. Meanwhile, four pesantrens ran trade business and three pesantrens concerned with industry.

Kyai as a central figure played an important role in managing this economic business, especially in planning, organizing, and controlling. In almost all pesantrens, santri, society, and alumni were involved technically in running the business.

Keywords: *economic business in pesantrens, agribusiness, industry*

A. LATAR BELAKANG

Sebagai sebuah “institusi budaya” yang lahir atas prakarsa dan inisiatif masyarakat, secara sosiologis, pondok pesantren tergolong sebagai sebuah institusi sosial yang memiliki corak yang khas.

Corak khas pondok pesantren tersebut dapat dilihat antara lain pada peran sentral kyai --sebagai pendiri pondok pesantren--, hubungan antara

Suwito NS, M.Ag adalah Dosen dan
Peneliti pada STAIN Purwokerto

santri dan kyai, hubungan masyarakat dengan kyai, dan hubungan masyarakat dengan komunitas pondok pesantren itu sendiri. Secara gradual, interaksi antar elemen yang terkait dengan pondok pesantren tersebut menunjukkan pola *modelling*. Kyai menjadi orientasi model bagi para santrinya, demikian pula bagi masyarakat di sekitarnya. Interaksi Kyai dan santri pada sebuah pesantren kemudian membentuk identitas perilaku kolektif komunitas internal pesantren, dimana identitas perilaku kolektif komunitas internal pesantren tersebut kemudian menjadi orientasi model perilaku dalam kehidupan masyarakat.

Gambaran tentang lahirnya pesantren pada dasarnya sejalan dengan filosofi wujudnya pasar sebagai tempat jual beli, di mana para penjual dan pembeli tidak dapat begitu saja “dipaksa” menempati lokasi sebuah pasar. Namun, interaksi antara penjual dan pembeli itu sendiri yang menciptakan tempat yang disebut pasar. Ini merupakan cerminan intensifnya dialog antara pesantren dengan lingkungan sosialnya.¹

Dengan gambaran khas pesantren sebagaimana diutarakan di atas, maka tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi strategis², yakni: *pertama* sebagai pusat pengkaderan dan pencetak pemikir-pemikir agama/ulama (*center of excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia handal (*human resources*), dan *ketiga*, sebagai lembaga yang memiliki kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*community empowerment*). Dengan demikian, pondok pesantren dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan sosial

Karena keberadaan pesantren pada dasarnya adalah kehendak masyarakat, maka mestinya pesantren secara kelembagaan haruslah dapat berdialog dengan “pemiliknya” sendiri, dan mampu menghadirkan arus perubahan masyarakat sekitar pesantren. Selain itu, sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat (*community based education*), pesantren sangat memungkinkan untuk melakukan transformasi sosial melalui ikhtiar *community development*. Bahkan sebelum ada wacana *community development* sebenarnya beberapa pondok pesantren telah mengembangkan diri sehingga dapat dikategorikan sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) untuk mengembangkan masyarakat agar bisa berkembang secara swadaya.

¹ Sahal Mahfudh. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Jogjakarta: LKiS, h. 342.

² Rr. Suhartini. 2005. “Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren,” dalam A. Halim, (Ed.). *Manajemen Pesantren*. Jogjakarta: LKiS, h. 233.

Kendati kebanyakan pesantren lebih memposisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan (*tafaqquh fi al-din*), namun, sejak tahun 1970an telah terjadi “pergeseran” paradigma, di mana beberapa pesantren mencoba melakukan reposisi sebagai bagian dari upaya merespon dinamika kehidupan sosial¹³.

Sebagai contoh, Pondok Pesantren Maslakul Huda Margoyoso Pati pimpinan KH. Sahal Mahfudz. Pondok pesantren ini telah berhasil mengembangkan lembaga semacam LSM yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan perekonomian. Basis kekuatan pengembangan yang dilakukan oleh pesantren ini bertumpu pada kyai yang secara sosiokultural memiliki jaringan potensial yang dapat dikembangkan. Demikian pula Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang telah berhasil mengembangkan model koperasi syari’ah berbasis pesantren.

Kecenderungan pesantren untuk melakukan reposisi sebagai bagian dari upaya merespon dinamika kehidupan sosial tentu saja tidak hanya terjadi di dua pesantren tersebut. Dari ratusan pondok pesantren yang ada di negeri ini, tentu banyak juga pesantren yang mencoba melakukan hal serupa. Hal tersebut sangat boleh jadi terbangun dari sebuah konstruk pemikiran integratif (non dikhotomik), yang memandang bahwa kehidupan dunia dan akhirat adalah berjalan seiring bahkan integral (menyatu). Meninggalkan salah satu di antara keduanya sama dengan melanggar kodrat atau menyalahi *sunnatullah*, sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-Qashash: 77. Dari paradigma inilah kemudian lahir program aksi yakni upaya menggapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 201.

Aktivitas ekonomi adalah satu sarana untuk hidup sejahtera. Sementara hidup yang sejahtera (*hasanah*) adalah anjuran agama. Dengan demikian, upaya pencapaian kesejahteraan hidup melalui aktivitas ekonomi adalah anjuran agama. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan ungkapan *kada al-faqr an yakuna kufran* (kefakiran atau kemiskinan mendekati pada kekufuran), maka pemikiran tentang pengembangan ekonomi adalah hal yang sangat penting, terlebih jika lokomotif pengembangan ekonomi tersebut adalah pondok pesantren.

Untuk mengoptimalkan fungsi pesantren sebagai lembaga yang strategis dalam pengembangan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, maka diperlukan pemetaan berbagai aktifitas pengembangan

¹³ *Ibid.*

ekonomi pesantren dalam rangka menemukan model pengembangan ekonomi pondok pesantren yang prospektif dan *replicable*.

B. TUJUAN DAN FOKUS PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan gambaran tentang aktifitas pengembangan ekonomi di 12 pesantren yang fokuskan pada:

1. Model-model yang diterapkan oleh pesantren terkait dengan pengembangan ekonomi, yang meliputi : jenis usaha ekonomi yang dikembangkan; *values system* (filosofi) yang menjadi dasar pengembangan ekonomi; dan manajemen (POAC), termasuk keterlibatan dan peran kyai dalam mengembangkan ekonomi.
2. Derajat efektifitas dari model pengembangan ekonomi pesantren.
3. Model alternatif pengembangan ekonomi pesantren yang *replicable* bagi pesantren lain, yang merupakan sintesa dari berbagai model pengembangan ekonomi seluruh pesantren yang diteliti.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada 12 pesantren di 12 propinsi yang memiliki usaha ekonomi dengan subyek kyai, pengurus, santri, dan masyarakat berdasarkan representasi area (Indonesia bagian Timur, Tengah, dan Barat) dan profil pesantren (agribisnis, jasa, perdagangan, dan industri), yaitu: Pesantren Al Ittifaq (Jabar), Darul Hijrah (Kalsel), Hidayatullah (Kaltim), Nurussabah (NTB), Walisongo (Lampung) An Nur I (Jatim), Sabilul Hasanah (Sumsel), Al-Hidayat (Jateng), Al-Kautsar (Riau), Nurul Yaqin Siti Manggopoh (Sumbar), Darul Arafah (Sumut), Tiga Dimensi (Sulawesi Selatan).

Metode penggalian data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan Triangulasi dengan tahapan: (1) reduksi data, (2) display, dan (3) konklusi.

D. KONSTRUKSI TEORITIS PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN

Secara sosiologis, pesantren mempunyai keunggulan dan kedekatan strategis untuk memberdayakan masyarakat. Ikatan (emosional, rasional, dan nilai) keagamaan serta kharisma seorang kyai-ulama bagi masyarakat menjadi faktor yang signifikan untuk menempatkan pesantren sebagai salah satu motor penggerak lahirnya perubahan sosial melalui aksi pemberdayaan sosial. Kemampuan pesantren untuk melakukan ikhtiar

pemberdayaan akan efektif kalau ada perubahan cara pandang pesantren yang tidak hanya berorientasi 'ke dalam' dengan hanya berbicara murni soal agama tanpa peduli dengan realitas sosial. Pesantren dan masyarakat adalah dua entitas yang satu dan padu, karena bagaimanapun kelahiran pesantren merupakan gambaran dan keinginan komunitas di mana pesantren didirikan.

Pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, sumber kepemimpinan informal telah menyediakan ruang bagi berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang memungkinkannya untuk mengambil peran pemberdayaan. Kenyataan ini memberikan indikator yang jelas betapa pesantren dengan tokoh kyainya berusaha untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan memberikan berbagai program pendidikan ataupun pelatihan khususnya pada rakyat kecil, di kala pendidikan hanya mengabdikan kepada masyarakat elit saja dalam rangka penumbuhan masyarakat yang beradab (*civil society*).⁴

Dalam pandangan Ali Maschan (PW NU Jatim), bahwa tugas pokok kyai adalah menciptakan kesejahteraan umum melalui penguatan *civil society*. Peran kyai dalam proses penumbuhan *civil society* ini dilakukan melalui dimensi pendidikan, ekonomi dan penegakkan *amar makruf nahi munkar*. Secara teknis upaya itu dilakukan kyai dengan memberi inspirasi, motivasi, dan stimulasi agar seluruh potensi masyarakat diaktifkan dan dikembangkan secara maksimal dengan kegiatan pembinaan pribadi, kerja produktif yang diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan bersama.⁵

Dalam konteks pengembangan ekonomi umat, upaya-upaya kyai untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat telah banyak dilakukan oleh beberapa pondok pesantren. Berbagai pengembangan ekonomi umat yang berbasis pesantren ini biasanya mengambil bidang garap pengembangan ekonomi umatnya dengan mendasarkan pada potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat basisnya. Paling tidak, beberapa sektor pengembangan ekonomi yang selama ini banyak dikembangkan bermuara pada empat kategori yaitu pengembangan ekonomi sektor jasa, perdagangan, agrobisnis, dan peternakan.

⁴ Lukman Hakim. 2004. *Perlawanan Islam Kultural*. Surabaya: Pustaka Eureka, h. 115.

⁵ *Ibid.*, hh. 117-118.

Pilihan pada jenis usaha ekonomi apa yang perlu dikembangkan oleh pesantren tentunya mendasarkan pada realitas objektif potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar pesantren, sehingga gagasan pengembangan ekonomi yang dimotori oleh pesantren secara kelembagaan tidak tercerabut dari basis sosial ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Pada posisi demikian, akan lahir pola kerjasama sinergis antara pesantren dan masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi sehingga mampu menghadirkan realitas baru bahwa pesantren dapat memposisikan sebagai patner sekaligus *icon* perubahan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, hasil sinergi tersebut pada akhirnya akan memperkuat basis kelembagaan pondok pesantren menjadi pesantren yang mandiri dan mempunyai fundamental ekonomi yang kuat.

Berbicara tentang pemberdayaan ekonomi, pikiran kita dapat dipastikan tidak hanya dapat terfokus pada dunia materi, tetapi juga non materi (non ekonomi) seperti masalah kesadaran, aktor, dan peran kelembagaan. Hal ini selaras dengan Sudjatmoko yang mengatakan bahwa pembangunan bidang ekonomi bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi terkait dengan penjelmaan perubahan sosial dan kebudayaan. Dengan kata lain, membangun aspek ekonomi terkait erat dengan aspek non ekonomi seperti perubahan pola pikir, kesadaran, persepsi, dan budaya masyarakat.⁶

Terkait dengan masalah agama dan transformasi sosial, khususnya keterkaitan antara ajaran agama dan perkembangan dunia material, penemuan Weber, Berger, dan Geertz kiranya dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian ini.

Weber, dalam karya monumentalnya mencatat bahwa ajaran Protestan madzhab Calvinis secara signifikan merangsang dan mendongkrak tumbuh suburnya Kapitalisme Barat. Etika Calvinis membantu meningkatkan atmosfir keadaan jiwa perekonomian yang kemudian memunculkan Kapitalisme Barat.⁷

⁶ Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, h. 24. Lihat juga Irwan Abdullah. 2002. "Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Transformasi Sosial; Suatu Pendekatan Budaya," dalam *Humaniora*, Vol. XIV No. 3, h. 260.

⁷ Weber. 1930. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. New York and London: Scribner; Weber. 1977. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press. Edited by G. Roth and Wittich.

Madzhab Calvinis sebagaimana temuan Weber berkeyakinan bahwa manusia akan selamat dari murka Tuhan jika manusia selalu memenuhi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan dimaksud antara lain adalah usaha mandiri dan kerja keras. Pendapat demikian dipercayai Weber sebagai tipe ideal kaum Calvinis. Sukses dalam dunia bisnis yang dicapai melalui usaha mandiri merupakan “jalan bebas hambatan” untuk mencapai surga Tuhan. Kerja keras dan usaha mandiri inilah yang dipercayai Weber asal-usul bangkitnya kapitalisme.

Orientasi religius baru dapat merubah sikap masyarakat terhadap dunia. Nilai religius tersebut juga menjadi sikap yang menekankan penguasaan yang lebih rasional tentang dunia dan transformasinya. Perubahan sikap tersebut membawa dampak langsung pada dunia material (ekonomi). Dari penyembahan Tuhan dan jaminan keselamatan manusia, umat manusia diajak untuk menciptakan sistem ekonomi baru yang berdasarkan pencapaian keuntungan rasional. Walaupun demikian Weber menegaskan bahwa kapitalisme tidak berkembang hanya karena agama Protestan, tetapi tanpa agama dengan nilai semacam itu, kapitalisme tidak akan berkembang seperti sekarang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa proses transformasi sosial menurut Weber adalah karena adanya beberapa faktor. Pertama adalah pencapaian “tipe ideal” yang dapat terinspirasi dari ajaran agama maupun ajaran moral. Tipe ideal adalah contoh model kegiatan-kegiatan sosial yang dipakai dalam menafsirkan dan memahami tingkah laku manusia. Tipe ideal adalah entitas mental atau gagasan tentang tindakan. Sebagai contoh dari penjelasan di atas Weber menggunakan tipe ideal kapitalisme dan Islam. Dari tipe ideal ini memunculkan ciri-ciri tingkah laku (baik kapitalis, Protestan maupun Islam) yang dipilih, dibuang, dan diperluas untuk membentuk sebuah model tingkah laku.

Kedua, organisasi otoritas.⁸ Secara naluriah manusia ingin mengejar kepentingan-kepentingan sesuai dengan tipe idealnya maupun kepentingan materinya. Peran yang dipandang menentukan adalah organisasi-organisasi otoritas. Melalui fungsi dan peran organisasi otoritas ini (baca: negara,

⁸ Weber membuat tiga garis besar otoritas yang *legitimed* yaitu, *otoritas tradisional rasional dan otoritas kharismatik*. Otoritas tradisional adalah otoritas yang berdasarkan kepada penerimaan-penerimaan kesucian aturan-aturan. Hal ini dikarenakan aturan-aturan tersebut telah lama ada dalam legitimasi pemerintahan mereka. Dalam otoritas tradisional, individu harus selalu loyal dan taat kepada tradisi. Adapun usul-usul loyalitas berakar pada sebuah kepercayaan atau kesakralan peristiwa-peristiwa sejarah tertentu.

gereja) akan menjamin dan melegitimasi maksud (tipe ideal) yang diinginkan. Hukum-hukum rasional ala mereka dapat dijadikan sandaran dalam beraktivitas. Weber secara tidak sadar menomorsatukan faktor organisasi otoritas sebagai langkah awal transformasi. Artinya, walau tipe-tipe ideal itu ada dalam masyarakat, tetapi selagi tipe ideal itu tidak diperjuangkan dengan bantuan organisasi otoritas (terutama *otoritas rasional*), maka tidak akan tercapai dengan maksimal.

Sebagaimana dinyatakan oleh Randall Collin yang dikutip Sanderson⁹ sebagai berikut, “Negara adalah penyebab yang lebih berarti. Negara adalah faktor yang diberi perhatian terbesar oleh Weber. Negara adalah kunci bagi semua struktur”. Pendapat Collin tersebut diperkuat oleh Gidden¹⁰ dan Held yang mengatakan bahwa setiap tertib hukum secara langsung mempengaruhi distribusi kekuasaan yang baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis dalam komunitas tertentu.

Dengan kata lain, Weber berkeyakinan bahwa budaya baru dalam suatu masyarakat akan dapat mengubah masyarakat sesuai dengan keyakinan dan budaya yang baru tersebut, termasuk jika keyakinan dan budaya baru tersebut terkait dengan ekonomi, seperti terbukti pada peran kebudayaan di kalangan Calvinis. Kepercayaan akan “orang terpilih” membangkitkan etos kerja dan semangat yang membara dan terus menerus untuk memastikan menjadi yang terpilih atau tidak. Kepastian tentang keselamatannya hanya dapat dilihat di dunia ini. Keyakinan semacam ini ditunjukkan Weber sebagai kekuatan yang besar di dalam memunculkan organisasi kerja dalam mengatur perilaku ekonomi.¹¹

Otoritas kharismatik, adalah jenis tatanan yang *dilegitimasi* dan kualitas-kualitas pribadi terkemuka Dari individu-individu yang luar biasa. Heroisme dan keutamaannya memungkinkan untuk memerintah sejumlah besar orang. Kekharismatikan seseorang dilukiskan dengan kualitas-kualitas adimanusiawi yang banyak dikenakan pada para Nabi, wali dan pahlawan-pahlawan militer. Kualitas ini menurut Weber memungkinkan untuk memaksakan gagasan (pengikutnya).

Sedangkan otoritas legal (rasional) adalah sebuah otoritas yang berdasarkan pada sebuah kepercayaan akan “legalitas” aturan-aturan tertentu. Dengan demikian, dalam otoritas ini aturan-aturan dan huklum secara formal dan betul telah dipaksakan dengan sejumlah prosedur yang diterima. Anthoni Gidden dan David Held (Ed.). 1987. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, terj. Vedi R. Hadiz. Jakarta: Rajawali Press, h. 23-28.

⁹ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi*, hlm. 182.

¹⁰ Antoni Gidden & Davis Held (Ed.). *Op. Cit.*, h. 23.

¹¹ Lihat Irwan Abdullah, *Op. Cit.*, h. 261.

Masih dalam kerangka pikir yang sama, Bellah juga menunjukkan bahwa agama Tokugawa secara signifikan merupakan sumber inspirasi penting di dalam tindakan ekonomi Jepang, yang kemudian ini memunculkan revolusi ekonomi di negeri Sakura ini.¹² Ini juga tampak dalam masyarakat Indonesia, agama menjadi spirit pada tahap awal perkembangan modernisasi ekonomi di beberapa tempat, terutama pesisir utara Jawa sebagai sentra perdagangan para penyebar Islam di Nusantara.¹³

Selain Weber, terdapat beberapa ahli lain yang menunjukkan etika agama menjadi pendorong munculnya transformasi ekonomi di beberapa tempat seperti ditunjukkan oleh Geertz (1963), Castle (1967), Kuntowijoyo (1971), de Jonge (1989), dan Muhaimin (1990).

Agama memiliki kekuatan yang dapat memberikan legitimasi religius di samping dapat menjadi legitimator institusi sosial. Legitimasi religius ini tampak dalam aktivitas keseharian para pengikut agama tertentu yang menunjukkan kepatuhan dan kesalihan sebagai wujud dari “ideasi religi” yang terakumulasi dalam tradisi keagamaan. Sedangkan legitimasi agama terhadap lembaga-lembaga sosial berupa pemberian status ontologis yang absah, yakni meletakkan lembaga-lembaga tersebut dalam suatu kerangka acuan keramat dan kosmik.¹⁴

Masih terkait dengan agama dan perubahan sosial, karya lanjutan Weber dalam sosiologi agama memperkuat tesis dasarnya bahwa hanya reformasi Protestanlah yang mampu menciptakan asketisme duniawi sebagai *conditio sin qua non* bagi berkembangnya rasionalitas instrumental ekonomi pasar kapitalistik. Sangat kontras dengan Protestanisme, karya perbandingannya tentang Islam dipenuhi oleh sikap skeptiknya tentang kemampuan Islam untuk menumbuhkan rasionalitas instrumental dan orientasi keduniawian bagi para pengikutnya. Menurut Weber, Islam yang dipenuhi ajaran sufistik dan orientasi petualangan para *warrior* penyebar Islam mencegahnya untuk menumbuhkan asketisme duniawi sebagaimana yang terjadi di Kristen.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Groenevelt. 1960. *Historical Note on Indonesia and Malaya: Completed form Chinese Source*. Jakarta: Bharata. Lihat juga Drewes, “New Light on the Coming of Islam Indonesia”, dalam *BKI* 124 (4), hh. 433 – 459; Meilink-Roelofs. 1966. *Trade and Islam in Malay-Indonesia Archipelago*. The Hague: Martinus Nijhoff.

¹⁴ Peter L. Berger. 1991. *Langit Suci*. Jakarta: LP3ES, hh. 41, 51; Lihat juga Lukman Hakim. 2004. *Perlawanan Islam Kultural*. Jogjakarta: Pustaka Eureka, h. 13.

¹⁵ Luthfi Makhasin, www.lafadz

Terkait dengan *tools of social and economic transformation* sebagai sebuah elemen perubahan sosial, menarik untuk disimak juga temuan Geertz dalam karyanya *The Religion of Java* dengan subjek penelitian di Mojokuto. Sekalipun menggunakan frame analisisnya Weber, Geertz melihat sisi lain dari perubahan sosial di Mojokuto.

Geertz melihat kemiripan semangat kapitalisme dalam umat Islam sebagaimana tradisi dalam masyarakat Protestan di Barat,

"In the light of theories of Max Weber concerning the role of Protestantism in stimulating the growth of the business community in the West, it is perhaps not surprising that the leaders in the creation of such a community in Mojokuto are for the most part intensely reformist Moslem, for the intellectual role of reform in Islam has at least in some ways, approached the Protestantism in Christianity. Emphasizing that the systematic and untiring pursuit of worldly ends may be a religiously significant virtue of fundamental importance".¹⁶

Weber sebagaimana disinyalir Abdullah¹⁷ mengatakan bahwa agama dalam proses sosial dapat dipandang sebagai dasar dalam pembentukan rasionalisasi kehidupan yang memberi basis pada perkembangan ekonomi. Agama menjadi motivator dalam proses transformasi konseptual (pandangan hidup) yang secara langsung berkaitan dengan apa yang disebut Weber sebagai rasionalisasi, yakni kehidupan sosial ekonomi atas dasar prinsip efisiensi.

Tumbuhnya rasionalisme berarti hilangnya praktik-praktik magis¹⁸ dan spekulatif¹⁹ dalam suatu masyarakat. Hasil reformasi yang dilakukan lembaga agama menurut Weber adalah munculnya suatu pola kehidupan yang konsisten, sistematis, dan etis.²⁰

Penemuan Geertz tentang Islam di Jawa menepis temuan Weber sebelumnya yang mengatakan bahwa spirit Islam bersifat cenderung sufistik yang ini menjadi faktor stagnannya dunia material. Sementara

¹⁶ Geertz, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesia Towns* (Chicago: The University of Chicago Press, 1963), hal. 337.; Geertz, "Social Change and Economic Modernization in Two Indonesia Towns: A Case in Point", dalam G. Dalton (ed.), *Tribal and Peasant Economies* (New York: The Natural History, 1967) hal. 366-394.

¹⁷ Abdullah, *Ibid.*

¹⁸ Geertz, *Peddlers and Princes*, hal. 63

¹⁹ Weber, *Economy and Society*, hal. 587.

²⁰ *Ibid.*

itu, Geertz menemukan kenyataan lain di Mojokuto bahwa kita tidak dapat menafikan pengaruh reformasi Islam yang sedang tumbuh subur di Indonesia masa 1950-an dalam mendorong tumbuhnya sikap rasional di kalangan pengusaha muslim perkotaan. Dalam analisisnya tentang perkembangan masyarakat urban di Mojokuto, Geertz mengamati proses transformasi sosial yang ditimbulkan oleh usaha sistematis kalangan pengusaha Muslim perkotaan untuk menciptakan bisnis yang efisien dan akumulasi modal. Perkembangan ini ada dan mirip sebagaimana pada kasus gerakan Protestanisme yang diamati Weber.

Bagi Weberian lain, seperti Castle dan Peacock mempercayai bahwa institusi legal-rasional adalah determinan lain yang sangat penting bagi munculnya ekonomi kapitalistik. Institusi legal-rasional ini penting untuk menopang institusi pasar supaya berfungsi dengan baik. Dia berfungsi untuk menjamin terlaksananya perjanjian kontrak jual-beli, melindungi hak milik, menyediakan fasilitas publik, dan memberi hukuman bagi mereka yang melanggar aturan main ekonomi pasar. Lebih dari itu, institusi legal-rasional adalah produk agregat dari rasionalitas individual. Kerangka ini mengandaikan sebuah proses perubahan yang linier dari rasionalitas individu ke institusi legal-rasional. Rasionalitas individu membentuk rasionalitas kolektif dan rasionalitas kolektif tercermin dalam rasionalitas institusi politik dan birokrasi (baca: negara) untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang mendukung berfungsinya institusi pasar. Baginya, rasionalitas individual dan institusional adalah prasyarat bagi apa yang dinamakan modernisasi.

Geertz maupun Weber sebagaimana dikemukakan di atas berupaya menjelaskan bagaimana perubahan masyarakat terjadi menurut versinya masing-masing. Walau demikian, dalam prosesnya ada tiga hal penting menurut Soedjamoko: 1) proses pembangunan masyarakat (termasuk pembangunan ekonominya) membutuhkan transformasi sosial, yakni untuk membentuk kesiapan masyarakat menerima nilai-nilai baru yang melekat di dalamnya. Inilah yang menjadi starting pointnya. 2) proses transformasi adalah proses yang berkelanjutan, 3) kalaulah teknologi sebagai *tools* untuk kepentingan ini, maka teknologi harus tidak mendikte terhadap manusia.²¹

Secara kelembagaan, pesantren sebagaimana dalam sejarahnya memiliki peran sentral dalam pengembangan agama Islam di Nusantara.

²¹ Abdullah, "Tantangan", hal. 269.

Sebagai sebuah institusi, lembaga ini dengan kyainya memiliki kekuatan yang mengakar pada masyarakat. Karena begitu kuat pengaruh kultur pesantren terhadap masyarakat, inovasi dan pembaharuan yang berasal pesantren akan cepat diserap dan diadopsi masyarakat. Ini karena pesantren, kalau memakai istilah Berger sebagai lembaga sosial yang memiliki legitimasi kuat berdasarkan nuansa agama. Karena legitimasi ini, *community development* dalam berbabagi bidang, termasuk pengembangan ekonomi masyarakat akan *low resistance*, dibanding dengan lembaga yang tidak memiliki legitimasi.

Di sisi lain, Islam sebagai sistem nilai sangat berpengaruh pada prilaku penganutnya. Komunitas muslim perkotaan memungkinkan untuk mengambil peran-peran dalam pengembangan ekonomi kiranya relevan untuk dijadikan dasar pijakan dalam merumuskan teori pengembangan ekonomi pesantren yang notabene institusi pendidikan yang berbasis agama Islam. Dalam hal ini, Islam dipandang sebagai faktor determinan dalam membangun dinamika dunia material yang mendasarkan pada basis pemahaman perlunya keseimbangan antara dimensi spiritual dengan material atau antara yang sakral dan profan.

Dengan mendasarkan pada kerangka teoritis di atas, maka proses penelitian menjadi terarah dan bisa memaknai setiap fenomena/fakta sebagaimana adanya untuk kemudian ditafsirkan menjadi bagian dari temuan ini.

D. TEMUAN PENELITIAN

1. Kronologi munculnya usaha ekonomi pesantren dimulai dari kebutuhan pesantren untuk menghidupi dirinya (*survive*) dan dalam rangka mengembangkan peran atau perluasan mandat (*wider mandate*) pesantren sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas ekonomi pesantren ini dimotivasi dan didasari oleh nilai *ilahi* dan *insani* (*fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirah al-hasanah*).
2. Pilihan aktivitas ekonomi ditentukan oleh: (a) kemampuan kyai membaca, mendefinisikan, memanfaatkan, dan mengorganisasikan *resources*, (b) kondisi geografis, (c) kondisi sosiokultur baik internal maupun eksternal.
3. Jenis usaha ekonomi yang dilakukan pesantren yang diteliti (12 pesantren) dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu: Agribisnis (pertanian, perikanan, perkebunan), Jasa (KBIH,

- percetakan, Lazis, BMT, koperasi), Perdagangan (ritel, pertokoan, agen penjual), Industri (penjernihan air, mebel).
4. Hampir seluruh pesantren yang diteliti melaksanakan usaha ekonomi agribisnis, terutama pada kategori pertanian *on-farm*. Hanya ada tiga pesantren (Hidayatullah Kaltim, Walisongo Lampung, Sabilul Hasanah) yang melakukan usaha di bidang jasa. Empat pesantren (Walisongo Lampung, An Nur I Jatim, Sabilul Hasanah Sumsel, Al-Hidayat Jateng) yang bergerak di bidang perdagangan, serta hanya tiga pesantren (Darul Hijrah Kalsel, Hidayatullah Kaltim, Sabilul Hasanah Sumsel) yang menekuni bidang industri.
 5. Jenis-jenis Usaha. Hampir keseluruhan pondok pesantren yang diteliti memiliki usaha ekonomi dengan spektrum yang terentang dari usaha ekonomi yang berskala kecil sampai yang berskala besar. Dilihat dari jenis usaha ekonomi yang dikembangkan, hampir sebagian besar pondok pesantren yang diteliti memiliki lebih dari satu jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi yang dikembangkan oleh pondok pesantren yang diteliti secara keseluruhan meliputi :

No	Nama PP	Basis Filosofis Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren	Jenis Usaha Ekonomi Utama Yang Dikembangkan
1	Al Ittifaq, Ciwidey, Bandung, Jawa Barat	<p>Sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus memerankan diri secara maksimal untuk kemaslahatan alam semesta. Dari konsep ini muncul slogan, <i>"Jangan ada sejengkal tanah yang ganggur, jangan ada waktu sedetikpun yang luang, dan jangan ada sehelai daunpun yang terbangun"</i>.</p> <p>Keselarasan antara teori dan praktik (<i>al-ittifaq</i>), antara ilmu agama dan non agama (ekonomi), yang keduanya adalah kebutuhan primer manusia</p> <p>Membangun etos kerja melalui shalat jamaah yang dilaksanakan diawal waktu, yang diyakini dapat meningkatkan derajat (termasuk derajat ekonomi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian 2. Agribisnis 3. Peternakan (Sapi, kambing, kelinci) 4. Koppontren 5. Perikanan (Jenis air tawar)

2	Darul Hijrah, Cindai Alus, Martapura, Kalimantan Selatan	Mengembangkan pola pendidikan kader umat yang mandiri, trampil, berkarakter ilmiah dan uswah dalam kehidupan sehari-hari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perikanan 2. Koppontren (Kafe dan Pertokoan) 3. Industri (Dasi, Peci) 4. Perkebunan 5. Pendidikan
3	Hidayatullah, Tritip, Balikpapan, Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan idiil memuat nilai-nilai sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Lahirnya kesadaran dan pencerahan tentang Tuhan b. Lahirnya kesadaran akan kelemahan diri dan kemuliaan Tuhan c. Semangat keilmuan yang terbimbing wahyu 2. Landasan operasional, memuat cita-cita sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Tampil di lapangan dakwah b. Tunjukan identitas (sebagai pejuang kebenaran) c. Mengagungkan nama Allah (mewujudkan hukum Allah) d. Tazkiah e. Kemandirian (pilar ekonomi) f. Sabar dan istiqamah menjalankan tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peternakan Sapi 2. Peternakan Ayam 3. Perkebunan Jeruk 4. Budidaya Ikan 5. Baitul Mal Hidayatullah (BMH) 6. BMT Umat Mandiri 7. KBIH Hidayatullah 8. Koperasi Waserda 9. Koperasi GAPPHIDA 10. Perkebunan Jati Mas 11. Penjernihan Air dan Air Minum Kemasan Isi Ulang
4.	Nurushabah, Batunyalu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Pondok Pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan pengembangan ekonomi masyarakat. Visi ini didasarkan pada pemikiran bahwa " <i>semakin sejahtera kehidupan ekonomi masyarakat sekitar pesantren, maka akan semakin mandiri ekonomi pesantren</i> "	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peternakan Sapi 2. Budi Daya Tanaman Jahe 3. Penanaman Padi Bibit Unggul
5.	Walisongo, Abung Selatan, Lampung Utara, Lampung	Membangun komunitas dengan berbasis pada transformasi kesadaran beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggemukan sapi 2. Pendidikan 3. Pertanian 4. Jasa (KBIH)
6.	An Nur I, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Belajar hidup mandiri yang didasari dengan sifat amanah (keterpercayaan), jujur, dan memiliki kontribusi dalam membantu masyarakat kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koppontren (Supermarket, Toko) 2. Perkebunan 3. Pertanian 4. Pendidikan

7.	Sabilul Hasanah, Banyuasin, Sumatera Selatan	Menjadikan pesantren sebagai partner pemerintah dengan kerja nyata untuk mewujudkan manusia seutuhnya	1. Pendidikan 2. Perkebunan 3. Pertanian 4. Industri 5. Kopontren
8.	Al Hidayat, Lasem Rembang, Jawa Tengah	Kelegaan, <i>sumarah</i> (ikut arus), belajar tanpa pamrih, dan mengabdikan dengan tulus. Mengembangkan tradisi <i>entrepreneurship</i> menuju santri yang mandiri	1. Pendidikan 2. Kopontren
9.	Al-Kautsar, Riau	Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam, pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat yang berjiwa pesantren	1. Peternakan (sapi), 2. Koperasi, 3. Perikanan (lele dan emas), 4. wartel,
10.	Darul Arafah, Sumatera Utara	Lembaga pengkaderan Ulama dan Umara' yang berkualitas dan dinamis	1. Pembibitan jagung 2. Perikanan tawar 3. Kayu mindi, 4. Kelapa sawit 5. Peternakan unggas, penggemukan sapi 6. percetakan, 7. modiste
11.	Tiga Dimensi Sulawesi Selatan	Membentuk watak akademik, dengan kualitas SDM yang handal di bidang teknologi, kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan	1. Marmer 2. Pertanian (Argo industri dan bisnis)
12.	Nurul Yaqin SM, Sumbar	Mensejahterakan anak cucu agar bisa memberantas buta huruf, dan kebodohan dengan pendidikan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul.	Perkebunan

Keseluruhan jenis usaha ekonomi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu :

- 1) Agrobisnis (pertanian, perikanan, perkebunan)
- 2) Jasa (KBIH, percetakan, Lazis, BMT, koperasi)
- 3) Perdagangan (ritel, pertokoan, agen penjual)
- 4) Industri (penjernihan air, mebel)

Dengan klasifikasi ini bidang usaha tersebut, maka dapat dilihat jenis besarnya sebagai berikut:

No	NAMA PESANTREN	JENIS USAHA			
		Agribisnis	Jasa	Perdagangan	Industri
1.	Al Ittifaq, Jabar	v	-	-	-
2.	Darul Hijrah, Kalsel	v	-	-	v
3.	Hidayatullah, Kaltim	v	v	-	v
4.	Nurushabah, NTB	v	-	-	-
5.	Walisongo, Lampung	v	v	v	-
6.	An Nur I, Jatim	-	-	v	-
7.	Sabilul Hasanah, Sumsel	v	v	v	v
8.	Al-Hidayat, Jateng	-	-	v	-
9.	Al-Kautsar, Riau	v	-	-	-
10.	Perak, Sulsel	v	-	-	-
11.	Al-Arafah, Sumut	v	-	-	-
12.	Nurul Yakin SM, Sumbar	v	-	-	-

6. Penerapan prinsip-prinsip manajemen (POAC) Pada bagian ini akan tergambar peran masing-masing elemen (kyai, pengurus, santri, alumni, masyarakat, dan pihak lain) dalam sistem manajemen (POAC). Adapun peran masing-masing elemen tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Pesantren	P	O	A	C
1	Agribisnis	Al Ittifaq, Jabar	k-p	k-s-m	s-m-a	k-s-m
		Darul Hijrah	p	p	s-m-a	p
		Hidayatullah, Kaltim	p	p	s-m-a	p
		Nurushabah, NTB	k	k-m	k-m	k-m
		Walisongo, Lampung	k	pl	pl	pl
		An Nur I, Jatim	k	k	s	k
		Sabilul Hasanah, Sumsel	k	k	m	k
		Al-Kautsar, Riau	k-p	p	s-m-a	p
		Perak, Sulsel	k	k	s-m-a	k
		Al-Arafah, Sumut	p	p	s-m-a	p
		Nurul Yakin SM, Sumbar	k	k-m	m	k-m
		2	Jasa	Hidayatullah, Kaltim	p	p
Walisongo, Lampung	k			k	k-p	k-p
Sabilul Hasanah, Sumsel	k			k	k-p	k-p
3	Perdagangan	Walisongo, Lampung	kk	kk	kk-s	kk
		An Nur I, Jatim	k	k	s	k
		Sabilul Hasanah, Sumsel	k	kk	kk-m	k-kk
		Al-Hidayat, Jateng	kk	kk	s	kk
4	Industri	Darul Hijrah, Kalsel	p	p	s-m	p
		Hidayatullah, Kaltim	p	p	s-m-a	p
		Sabilul Hasanah, Sumsel	k	kk	kk-m-pl	k

K = kyai
 kk = keluarga kyai
 p = pengurus
 s = santri
 a= alumni
 m = masyarakat
 pl = pihak lain

7. Derajat efektifitas Derajat efektivitas yang dimaksud sini adalah dampak usaha ekonomi yang dikembangkan pesantren terhadap beberapa hal di antaranya: (a) *enterpreunership* santri terkait dengan dampak ekonomi (*income*) dan pembelajaran, (b) pondok p kontribusi terhadap pembiayaan operasional pesantren, (c) masyarakat, terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar pesantren, (d) pemerintah, terkait dengan dukungan secara langsung terhadap program pemerintah. Adapun derajat efektivitas usaha ekonomi terkait dengan empat hal tersebut sebagai berikut:

NO	PESANTREN	DERAJAT EFEKTIFITAS DALAM PENGEMBANGAN			
		En. Santri	Ponpes	Masyarakat	Pemerintah
1	Al Ittifaq, Jabar	ST	ST	ST	ST
2	Darul Hijrah	T	T	ST	S
3	Hidayatullah, Kaltim	ST	ST	ST	ST
4	Nurushabah, NTB	R	ST	T	T
5	Walisongo, Lampung	ST	T	R	R
6	An Nur I, Jatim	R	T	R	S
7	Sabilul Hasanah,	R	ST	R	S
8	Al-Hidayat	SR	SR	SR	SR
9	Al-Kautsar, Riau	ST	ST	ST	ST
10	Perak, Sulsel	T	SR	T	T
11	Al-Arafah, Sumut	T	ST	S	S
12	Nurul Yakin SM, Sumbar	R	ST	ST	T

7. Rekomendasi model yang *replicable* bagi pesantren lain:

- a. Agribisnis akan berkembang lebih baik jika karakteristik pesantren :
 (1) kyai sebagai figur yang memiliki kharisma tinggi (*social capital*) menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan segenap potensi masyarakat, (2) corak pesantren inklusif sehingga membuka ruang

- interaksi sosial dengan masyarakat, (3) secara geografis, pilihan jenis usaha yang dikembangkan oleh pesantren sesuai dengan potensi sda, (4) pesantren memiliki potensi tenaga kerja santri (*salaf*) yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung keberlangsungan usaha pesantren, (5) tingginya etos kerja dan komitmen masyarakat dalam pengembangan usaha. Adapun model manajemen yang sebaiknya diterapkan pada jenis usaha ini adalah: (a) kyai melakukan identifikasi dan *mapping* potensi bersama masyarakat pada pilihan jenis usaha ekonomi yang sesuai dengan sda, (b) bersama dengan masyarakat kyai melakukan pengaturan pola tanam, (c) santri dan masyarakat melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, (d) kelompok-kelompok tani, dkm, dan santri salafiyah melakukan evaluasi secara berkala dengan kyai sebagai fasilitator.
- b. Usaha bidang jasa akan memiliki peluang yang baik jika karakteristik pesantren : (1) kepemimpinan kolektif, (2) pesantren memiliki *social trust* tinggi, (3) kerekatan jamaah, (4) pesantren memiliki potensi tenaga kerja (alumni dan jamaah) yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung keberlangsungan usaha pesantren, (5) tingginya etos kerja dan komitmen alumni dan jamaah dalam pengembangan usaha, (6) tingginya *sense of belonging* alumni dan jamaah dalam pendanaan. Alternatif manajemen yang sebaiknya dilakukan adalah (a) yayasan pondok pesantren melakukan identifikasi dan *mapping* potensi ekonomi berdasarkan kebutuhan masyarakat, (b) yayasan pesantren mengatur job sesuai dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan masyarakat, (c) alumni dan jamaah (warga) melaksanakan rencana yang telah ditetapkan secara profesional, (d) dilakukan secara gradual oleh masing-masing devisi dan secara general oleh pesantren.
- c. Usaha bidang perdagangan akan memiliki peluang yang baik jika karakteristik pesantren: (1) kyai dan atau yayasan memiliki visi bisnis, (2) ketersediaan pasar, (3) rasio kepemilikan modal yang memadai, (4) *social trust* yang tinggi. Alternatif manajemen yang sebaiknya dijalankan : (a) kyai dan atau yayasan melakukan identifikasi potensi pasar yang sesuai dengan kebutuhan santri dan masyarakat, (b) kyai dan atau yayasan pesantren mengatur tata laksana perdagangan, (c) santri dan atau ustadz melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan dinamika.

SUMBER TULISAN

- Abdullah, Irwan. 2002. "Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Transformasi Sosial; Suatu Pendekatan Budaya", dalam *Humaniora*, Vol. XIV No. 3.
- Aziz, Moh. Ali. 2005. "Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Umat", dalam A. Halim, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, A. Sunaryo AS (Eds), *Manajemen Pesantren*. Jogjakarta: LkiS.
- Berger, Peter L. 2004. *Langit Suci*. Jakarta: LP3ES.
- Depag RI, Dirjen Bagais. 2004. *Pesantren Agrobisnis: Pendekatan Formula Area Multi Fungsi dan Model Konsepsi Pemberdayaan serta Profil Beberapa Pesantren*. Jakarta: Direktorat Pekapontren Depag RI.
- Drewes, "New Light on the Coming of Islam Indonesia", dalam *BKI* 124 (4): 433 – 459
- Geertz. 1963. *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesia Towns*. Chicago: The University of Chicago Press
- _____. 1967. "Social Change and Economic Modernization in Two Indonesia Towns: A Case in Point", dalam G. Dalton (Ed.), *Tribal and Peasant Economies* New York: The Natural History.
- Gidden, Anthoni dan David Held (Ed.). 1987. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, terj. Vedi R. Hadiz. Jakarta: Rajawali Press
- Hamid, A. dan Hidayat, Nur (Ed.). 2001. *Perspektif Baru Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*. TTP: Tri Guna Bhakti.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Jogjakarta: LkiS.
- Qomar, Mujamil. TT *Pesantren, Dari Trasformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlanga.
- Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Suhartini, Hj. Rr. 2005. "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, A. Sunaryo AS (Eds), *Manajemen Pesantren*. Jogjakarta: LkiS.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. "Pondok Pesantren Masa Depan" dalam *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, dalam Marzuki Wakhid dkk (Ed.). Bandung: Pustaka Hidayah.
- Weber. 1930. *The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism*. New York and London: Scribner.
- Weber. 1977. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press. Edited by G. Roth and Wittich.